

Manajemen Berbasis Masyarakat dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

Muhammad Alim Kahfi

Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal, Indonesia

elkahfi.13@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.14421/njpi.2022.v2i3-10>

Abstract

This study aims to describe the basic concepts of community-based education management both theoretically and practically and explain how community-based management is implemented in the management of early childhood education institutions. This study uses a type of library research (library research). The results of the study show that there are at least eight types of community that play a role in community-based management in PAUD management, including individuals (religious leaders), families, Education Implementation Support Agencies (BP3) or school committees, professional organizations (GOPTKI, IGTKI, IGPAUD), entrepreneurs, community organizations, quality control of educational services, non-governmental organizations (NGOs).

Keywords: Management, Community, Early Childhood Education

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep dasar manajemen pendidikan berbasis masyarakat baik secara teoritis maupun praktisnya dan menjelaskan bagaimana penerapan manajemen berbasis masyarakat dalam pengelolaan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa paling tidak, ada delapan jenis masyarakat yang berperan dalam manajemen berbasis masyarakat dalam pengelolaan PAUD antara lain: perseorangan (tokoh agama), keluarga, Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) atau komite sekolah, organisasi profesi (GOPTKI, IGTKI, IGPAUD), pengusaha, organisasi kemasyarakatan, pengendalian mutu layanan pendidikan, lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Kata kunci: Manajemen, Masyarakat, Pendidikan Anak Usia Dini

Pendahuluan

Pendidikan menjadi cermin kemajuan sebuah bangsa. Maka wajar jika setiap negara berlomba-lomba untuk memperbaiki sistem pendidikannya baik dari segi manajemen, kebijakan, maupun kurikulumnya termasuk negara kita Indonesia. Disisi lain kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta perubahan zaman dan arus globalisasi yang begitu cepat menjadikan suatu keniscayaan bagi adanya perubahan sistem pendidikan di negeri ini.

Peran serta pemerintah sebagai pemangku kebijakan tidak bisa kita lepaskan dari setiap regulasi pendidikan yang ada di negeri ini. Namun apakah pemerintah sudah mampu mengakomodir sekian banyak kebutuhan masyarakat dalam menghadapi tantangan global. Mengingat negara Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak suku, ras, agama, serta budaya dan karakteristik sosiologis yang beraneka ragam.

Sistem pendidikan yang selama ini berlaku di Indonesia pada hakikatnya merupakan pencerminan kondisi negara dan kekuatan sosial-politik yang tengah berkuasa. Pendidikan dengan sendirinya merupakan refleksi dari orde penguasa yang ada.¹ Bahkan menurut Michael W. Apple sebagaimana dikutip oleh H.A.R. Tilaar, kurikulum pendidikan yang berlaku pada suatu negara sebenarnya sarana indoktrinasi dari suatu sistem kekuasaan. Melalui kurikulum, pemerintah telah menjadikan pendidikan sebagai sarana rekayasa dalam rangka mengekalkan struktur kekuasaan atau politiknya, walaupun bukan pada masalah tataran politik praktis.²

¹ Kartini Kartono, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional: Beberapa Kritik dan Sugesti*, Cet. I (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), Hlm. 77.

² H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*, Cet. I (Magelang: Indonesiatera, 2003), hlm. 93-94.

Jika kita perhatikan sistem manajemen dalam pendidikan, paling tidak ada tiga manajemen yang berlaku. Pertama, sistem pendidikan yang berorientasi pada pemerintah dari segala keputusan-keputusan yang berlaku dan diwujudkan melalui manajemen berbasis pemerintah (*state based education*). Kedua, sistem pendidikan yang memberikan kesempatan yang lebih luas kepada lembaga pendidikan untuk mengambil keputusan berkaitan dengan pendidikan dan diwujudkan melalui manajemen berbasis sekolah (*school based management*). Ketiga, pendidikan yang memberikan kesempatan yang luas kepada warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan diwujudkan melalui manajemen berbasis masyarakat (*community based education*).

Kedua sistem manajemen pendidikan baik yang berbasis sekolah maupun berbasis masyarakat terlahir berkaitan dengan reformasi pendidikan yang menghendaki adanya pergeseran paradigma pendidikan dari sentralistik menuju desentralistik. Bergeser dari praktik pendidikan yang otoriter ke praktik pendidikan yang demokratis yang membebaskan. Meskipun konsep manajemen berbasis masyarakat muncul lebih belakangan, sebagai perkembangan setelah manajemen berbasis sekolah dirasa belum mampu mengakomodir sekian banyak kebutuhan masyarakat yang sangat kompleks.

Menuju generasi Indonesia emas tahun 2045 sebagai bonus demografi bagi negeri ini, perlu diimbangi pula dengan penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Salah satu upaya penyiapan generasi emas tersebut adalah melalui pendidikan sejak dini. Mengingat generasi Indonesia emas mendatang akan diisi oleh anak-anak yang saat ini sedang mengenyam pendidikan pada tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Sehingga diperlukan manajemen yang lebih mapan dan berkualitas pula dalam menyiapkan para generasi yang berkualitas.

Berdasarkan hal tersebut di atas ada dua hal pokok yang harus dijawab oleh peneliti (1) Bagaimana konsep dasar manajemen berbasis masyarakat, sebagai jawaban dari kebutuhan masyarakat yang sangat kompleks baik dalam tataran konsep (teori) maupun praksisnya. (2) Bagaimana penerapan manajemen berbasis masyarakat dalam pengelolaan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan konsep dasar manajemen pendidikan berbasis masyarakat baik secara teoritis maupun praksisnya. (2) Menjelaskan bagaimana penerapan manajemen berbasis masyarakat dalam pengelolaan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dalam pemenuhan pendidikan dengan mengakomodir segala kebutuhan masyarakat melalui lembaga pendidikan PAUD, serta dalam rangka mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045 sebagai bonus demografi. Secara teoritis penelitian ini akan menambah khazanah keilmuan dalam bidang pendidikan khususnya dalam manajemen lembaga PAUD.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dalam pengumpulan datanya dengan cara menghimpun dari buku-buku, majalah, paper, maupun ensiklopedi yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Sifat dari penelitian pustaka ini adalah deskriptif-analitis, dimana peneliti mencoba menyajikan dan menggambarkan secara objektif tentang gagasan yang sebenarnya dari objek yang diteliti untuk kemudian diinterpretasikan dan dibandingkan.

Alasan utama peneliti menggunakan jenis penelitian ini adalah karena peneliti akan mendeskripsikan teori tentang Manajemen Berbasis Masyarakat dan implementasinya pada

pengelolaan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Objek dalam penelitian ini adalah teori tentang Manajemen Berbasis Masyarakat serta buku dan karya tulis lain yang berkaitan.

Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Teknik ini merupakan penelaahan terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian. Dalam penelitian kualitatif studi dokumentasi, peneliti dapat mencari dan mengumpulkan data-data teks atau image.³ Setelah data yang dibutuhkan dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, kemudian peneliti mengambil kesimpulan melalui teknik content analysis dengan metode deduktif-induktif.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Dasar Masyarakat

Kata “Masyarakat” merupakan alih bahasa dari *society* atau *community*. *Society* sering diartikan sebagai “masyarakat umum”, sedangkan *community* sebagai “masyarakat setempat” atau “paguyuban”. Dalam *Dictionary of Sociology*, *community* dimaknai sebagai suatu kelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dengan segala ikatan dan norma di dalamnya.⁴

Sedangkan Orden C. Smucker dan dikutip oleh Toto Suharto, mencoba mendekati pendidikan dengan perspektif masyarakat (*community approach to education*). Smucker mendefinisikan *community* sebagai suatu kumpulan populasi, tinggal pada suatu wilayah yang berdekatan, terintegrasi melalui pengalaman umum, memiliki sejumlah institusi pelayanan dasar, menyadari akan

³ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), hlm. 219.

⁴ Toto Suharto, *Pendidikan Berbasis Masyarakat*. (Yogyakarta: LKIS, 2012), hlm. 73-74

kesatuan lokalnya, dan mampu bertindak dalam kapasitasnya sebagai suatu korporasi.⁵

Pada dasarnya setiap masyarakat mempunyai gambaran tentang kondisi masa depan yang diidealkan. Dengan demikian sebetulnya disadari atau tidak setiap masyarakat mempunyai visi. Secara umum dan sederhana visi masyarakat menurut Soetomo, adalah kondisi kehidupan yang sejahtera. Sehubungan dengan konsep sejahtera sebagai visi setiap masyarakat ini dapat dilihat dari perspektif internal maupun eksternal.⁶

Dalam perspektif internal, walaupun kondisi kehidupan yang sejahtera adalah merupakan kondisi ideal yang diharapkan oleh setiap masyarakat, akan tetapi setiap masyarakat mempunyai konstruksi yang berbeda tentang kondisi sejahtera tersebut. Implikasinya adalah visi masyarakat yang satu dapat berbeda dengan yang lain tergantung dari konstruksinya tentang kesejahteraan.⁷

Dalam perspektif eksternal, rumusan tentang kondisi ideal yang disebut kesejahteraan tersebut dapat berupa sebuah konsep normative yang berisi kriteria tertentu yang harus dipenuhi apabila suatu kehidupan dikatakan sejahtera. Rumusan tersebut dapat merupakan hasil kajian akademik melalui landasan teori dan rumusan kesejahteraan yang beragam. Maka berbeda pula kriteria kesejahteraan yang digunakan termasuk peran dan tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan warganya.⁸

Pada dasarnya masyarakat menyadari bahwa realitas kehidupan yang ada belum sesuai dengan kondisi ideal.

⁵ *Ibid*

⁶ Soetomo, *Keswadayaan Masyarakat: Manifestasi Masyarakat untuk Berkembang secara Mandiri*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 41.

⁷ *Ibid*, hlm. 42.

⁸ *Ibid*, hlm. 45.

Berdasarkan kesadaran itu masyarakat mempunyai dorongan untuk melakukan suatu tindakan guna mewujudkan kondisi yang diidealkan tersebut. Tindakan tersebut pada dasarnya adalah proses perubahan menuju kondisi yang semakin sejahtera dan diidamkan. Termasuk dalam pendidikan, masyarakat sebenarnya memiliki dorongan untuk ikut serta dalam proses manajemen dalam pendidikan.

Ada 5 jenis masyarakat yang ikut berperan serta dalam pengelolaan pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini menurut Ibrahim Bafadal, yaitu:⁹

1. Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama bagi anak, oleh karena itu orang yang paling dekat dengan anak adalah keluarga. Selain itu keluarga juga merupakan sekolah pertama anak sebelum anak memasuki pendidikan formal. Sehingga keberhasilan anak dalam mengikuti pendidikan di Taman Kanak-kanak sangat ditentukan oleh keluarganya. Oleh karena itu dalam rangka mencapai keberhasilan penyelenggara pendidikan di Taman Kanak-kanak perlu adanya hubungan yang baik antara Taman Kanak-kanak dan orangtua murid.

2. Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan

Semua satuan pendidikan memiliki Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) atau komite sekolah. Misi utamanya adalah membantu memperlancar proses pendidikan. Adanya komite sekolah tersebut tidak hanya dapat membantu Taman Kanak-kanak dalam hal pendanaan pendidikan, melainkan juga dalam memprakarsai berbagai kegiatan yang dapat memajukan proses pendidikan.

⁹ Ibrahim Bafadal, *Dasar-dasar Manajemen dan Supervisi Taman Kanak-kanak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm.59-61.

3. Gabungan Organisasi Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Indonesia

Di Indonesia telah terbentuk Gabungan Organisasi Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Indonesia atau GOPTKI. GOPTKI merupakan wadah yang mengkoordinasikan semua pendidikan taman kanak-kanak. Tujuan GOPTKI adalah membina dan mengembangkan pendidikan taman kanak-kanak serta turut membantu meningkatkan kesejahteraan anak usia taman kanak-kanak agar menjadi warga negara RI yang berjiwa Pancasila.

4. Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia

Selain GOPTKI ada juga organisasi profesi guru taman kanak-kanak, yaitu Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia atau IGTKI. IGTKI merupakan organisasi profesional yang menjadi wadah guru taman kanak-kanak. Keberadaannya merupakan bagian dari Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI.

5. Instansi Terkait

Peningkatan mutu pendidikan taman kanak-kanak bukan hanya tugas KEMENDIKBUD saja, tetapi perlu melibatkan berbagai instansi terkait yang lain. Beberapa instansi terkait dengan pengembangan pendidikan taman kanak-kanak yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan lain-lain.

Pengertian Manajemen Berbasis Masyarakat

Secara etimologi, manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu dari asal kata *manus* yang berarti tangan, dan *agere* yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi kata kerja *managere* yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan dalam bahasa inggris dalam bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda *management*, dan *manager* untuk orang yang melakukan

management. Akhirnya *management* diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.¹⁰

Sedangkan secara terminologi, menurut Daft & Steer sebagaimana yang dikutip Syaiful Sagala, mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.¹¹ Selanjutnya Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah diterapkan sebelumnya agar efektif dan efisien.¹²

Dalam istilah pendidikan berbasis masyarakat, terkandung definisi implisit tentang “masyarakat”. Banyak orang menggunakan istilah ini untuk membedakannya dengan pendidikan yang “berbasis pemerintah” (*state based education*). Meskipun banyak pengertian tentang masyarakat, lazimnya istilah ini menunjuk pada kumpulan orang-orang yang hidup dalam hubungan yang akrab satu sama lain.¹³

Pengertian tentang “berbasis” (*based*) dapat menunjuk pada derajat kepemilikan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa apabila sesuatu berbasis masyarakat, maka hal itu sepenuhnya menjadi milik masyarakat. Kepemilikan mengimplikasikan pengendalian secara penuh terhadap pengambilan keputusan. Kepemilikan

¹⁰ Onisius Amtu, *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.1

¹¹ Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.52

¹² Suharsimi Arikunto & Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2008), hlm.4

¹³ Dikutip dari Dean Nielsen, “Memetakan Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat di Indonesia”. Dalam Fasli Jalal & Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), hlm. 176.

penuh berarti bahwa masyarakat memutuskan tujuan dan sasaran, pembiayaan, (tingkatan dan sumber), kurikulum, materi belajar (misalnya buku teks), standard an ujian, guru dan kualifikasinya, persyaratan siswa/peserta, tempat, dan segalanya.¹⁴

Menurut Winarno sebagaimana dikutip oleh Zubaidi,¹⁵ bahwa secara konseptual pendidikan berbasis masyarakat adalah model penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada prinsip “dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat”. Pendidikan dari masyarakat artinya pendidikan memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Pendidikan oleh masyarakat artinya masyarakat ditempatkan sebagai subek atau pelaku pendidikan, bukan objek pendidikan.

Dengan demikian masyarakat dituntut peran dan partisipasi aktifnya dalam setiap program pendidikan. Pendidikan untuk masyarakat artinya masyarakat diikutsertakan dalam semua program yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mereka. Hal ini berarti bahwa masyarakat harus diberdayakan, diberi peluang dan kebebasan untuk mendesain, merencanakan, membiayai, mengelola, dan menilai sendiri apa yang diperlukan secara spesifik di dalam, untuk, dan oleh masyarakat itu sendiri.¹⁶

Sedangkan menurut E.Hamilton & P.Cunningham dalam Ara Hidayat & Imam Machali, Pendidikan berbasis masyarakat adalah sebuah proses yang didesain untuk memperkaya kehidupan individual dan kelompok dengan mengikutsertakan orang-orang dalam wilayah geografis, atau berbagi mengenai kepentingan umum, untuk mengembangkan dengan suka rela, tempat

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat, Upaya Menawarkan Solusi Terhadap Berbagai Problem Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 131.

¹⁶ Ara Hidayat & Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2012), hlm. 252.

pembelajaran, tindakan dan kesempatan refleksi yang ditentukan oleh pribadi, sosial, ekonomi, dan kebutuhan politik.¹⁷

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa manajemen pendidikan berbasis masyarakat adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian semua sumber, personil, dan materiil dalam dunia pendidikan yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Landasan Manajemen Berbasis Masyarakat

Menurut catatan Watson yang dikutip oleh Umberto Sihombing, ada *tiga* elemen dasar yang saling bersinergi yang menjadi landasan filosofis bagi terwujudnya pendidikan berbasis masyarakat, yaitu *learning society*, *critical pedagogy*, dan berbasis lokal.¹⁸

Pertama adalah pendidikan bertumpu pada pengembangan masyarakat belajar (*learning society*). Landasan ini menegaskan adanya kepercayaan terhadap masyarakat untuk melaksanakan pendidikannya sendiri berdasarkan kekuatan, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimilikinya. Istilah ini menunjuk pada kenyataan dimana warga masyarakat secara aktif menggali pengalaman belajar didalam setiap segi kehidupannya. Setiap warga masyarakat secara sadar melakukan aktivitas belajar individual mandiri.

Kedua adalah bahwa pendidikan berbasis masyarakat senantiasa didasarkan pada perspektif kritis tentang pendidikan (*critical pedagogy*). Dibanding perspektif konservatif dan liberal, perspektif kritis lebih diutamakan untuk dapat mengembangkan pendidikan berbasis masyarakat, mengingat perspektif ini

¹⁷ *Ibid*, hlm, 253.

¹⁸ Dikutip dari Umberto Sihombing, “*Konsep dan Pengembangan Berbasis Masyarakat*”. Dalam Fasli Jalal & Dedi Supriadi . . . *Ibid*, hlm. 187.

menekankan pentingnya perbaikan dan perubahan bagi kemajuan masyarakat.

Ketiga adalah pendidikan berbasis masyarakat dilaksanakan dengan mengikuti asas berbasis lokal. Dengan berlokasi di masyarakat, diharapkan masyarakat dapat merancang, memutuskan, serta mengatur pendidikannya sendiri sesuai kebutuhannya.

Menurut Toto Suharto, dengan melihat beberapa landasan filosofis tersebut mengindikasikan perlunya pendidikan berbasis masyarakat melakukan hegemoni tandingan dan atau perlawanan terhadap pendidikan yang dikelola pemerintah. Akan tetapi, perlawanan ini bukan dalam bentuk lembaga politik, melainkan perlawanan budaya yang bermaksud membebaskan masyarakat untuk menentukan pendidikannya.¹⁹

Landasan yuridis Pendidikan Berbasis Masyarakat (*Community Based Education*) dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 pasal 54, 55, dan 56, mengenai peran serta masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat.²⁰ Pada pasal 54 : (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pada pasal 55 : (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan

¹⁹ Lihat Toto Suharto, *Pendidikan Berbasis . . . Ibid*, hlm. 98-102.

²⁰ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Cet. IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 41-42.

nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. (5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dari uraian pasal 54 dan 55 tersebut ada beberapa komponen masyarakat yang perlu dilibatkan dalam pengelolaan pendidikan, yaitu: perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Peran masyarakat disini sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Prinsip Manajemen Berbasis Masyarakat

Dalam pengelolaan lembaga PAUD dibutuhkan kepiawaian pengelola dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk tumbuh kembangnya PAUD yang dikelola. Dalam pengelolaan PAUD dapat dikelola oleh masyarakat atau manajemen berbasis masyarakat.

Michael W. Galbrait mengemukakan prinsip-prinsip manajemen berbasis masyarakat sebagai berikut:²¹

1. *Self determination* (menentukan sendiri)
Artinya semua anggota masyarakat memiliki hak dan tanggungjawab untuk terlibat dalam menentukan kebutuhan masyarakat dan mengidentifikasi sumber-sumber masyarakat yang bisa digunakan untuk merumuskan kebutuhan tersebut.
2. *Self Help* (menolong diri sendiri)
Artinya anggota masyarakat dilayani dengan baik ketika kemampuan mereka untuk menolong diri mereka sendiri telah didorong dan dikembangkan. Mereka menjadi bagian dari solusi dan membangun kemandirian lebih baik bukan tergantung karena mereka beranggapan bahwa tanggungjawab adalah untuk kesejahteraan mereka sendiri.
3. *Leadership development* (pengembangan kepemimpinan)
Artinya para pemimpin lokal harus dilatih dalam berbagai keterampilan dalam memecahkan masalah, membuat keputusan, dan proses kelompok sebagai cara untuk menolong diri mereka sendiri secara terus menerus dan sebagai upaya pengembangan masyarakat.
4. *Localization* (lokalisasi)
Artinya potensi terbesar untuk tingkat partisipasi masyarakat tinggi terjadi ketika masyarakat diberi kesempatan dalam pelayanan, program, dan kesempatan terlibat dekat dengan kehidupan tempat masyarakat hidup.
5. *Integrated delivery of service* (keterpaduan pemberian pelayanan)
Artinya hubungan antaragresi diantara masyarakat dan agen-agen yang menjalankan pelayanan publik dalam memenuhi tujuan dan pelayanan publik yang lebih baik.

²¹ Zubaedi, *Pendidikan . . . Ibid*, hlm.137-139.

6. *Reduce duplication of service* (mengurangi duplikasi pelayanan)
Artinya masyarakat harusnya memanfaatkan secara penuh sumber-sumber fisik, keuangan, dan sumber daya manusia dalam lokalitas mereka dan mengkoordinir usaha mereka tanpaduplikasi pelayanan.
7. *Accept diversity* (menerima perbedaan)
Artinya menghindari pemisahan masyarakat berdasarkan usia pendapatan, kelas sosial, jenis kelamin, ras, etnis, agama, atau keadaan yang menghalangi pengembangan masyarakat secara menyeluruh. Termasuk perwakilan warga masyarakat seluas mungkin dituntut dalam pengembangan, perencanaan, dan pelaksanaan program.
8. *Institutional responsiveness* (tanggungjawab kelembagaan)
Artinya pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah secara terus-menerus adalah sebuah kewajiban dari lembaga publik sejak mereka terbentuk untuk melayani masyarakat.
9. *Lifelong learning* (pembelajaran seumur hidup)
Artinya kesempatan pembelajaran formal dan informal harus tersedia bagi anggota masyarakat untuk semua umur dan berbagai jenis latar belakang masyarakat.

Sedangkan terkait tujuan manajemen pendidikan berbasis masyarakat, Malik Fajar dkk sebagaimana yang dikutip Abudin Nata merumuskannya sebagai berikut:²²

Pertama, membantu pemerintah dalam memobilisasi sumber daya setempat dan dari luar serta meningkatkan peranan masyarakat untuk mengambil bagian yang lebih besar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan, *Kedua*,

²² Abudin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Bandung: Angkasa, 2003), hlm. 149-150.

menstimulasi perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap rasa kepemilikan sekolah, tanggungjawab, kemitraan, toleransi, dan kesediaan menerima perbedaan sosial dan budaya. *Ketiga*, mendukung inisiatif pemerintah dalam meningkatkan dukungan masyarakat terhadap sekolah, khususnya orangtua dan masyarakat melalui kebijakan desentralisasi, *Keempat*, mendukung peranan masyarakat untuk mengembangkan kelembagaan untuk melengkapi, meningkatkan, dan mengganti peran sekolah dan mutu, serta efisiensi manajemen pendidikan.

Lalu dalam prinsip manajemen berbasis masyarakat ini dimana posisi pemerintah, apakah pemerintah tidak memiliki peran atau lepas tangan begitu saja. Umberto Sihombing mengungkapkan beberapa peran pemerintah dalam pelaksanaan manajemen berbasis masyarakat sebagaimana berikut: (1) Peran sebagai pelayan masyarakat, (2) peran sebagai fasilitator, (3) peran sebagai pendamping, (4) peran sebagai mitra, (5) peran sebagai penyandang dana.²³

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan PAUD

Masyarakat memegang peranan sentral dan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat. Peran masyarakat tersebut antara lain:²⁴

1. Tokoh masyarakat (termasuk tokoh agama, tokoh adat, dan pendidik) berperan sebagai pemrakarsa, mediator, motivator, tutor, pengelola, dan bahkan sebagai penyandang dana serta penyedia fasilitas pendidikan.
2. Organisasi kemasyarakatan berperan sebagai pemrakarsa. Perencana, penyelenggara, organisator, pemberi motivasi,

²³ Dikutip dari Umberto Sihombing, *Ibid*, hlm. 190.

²⁴ Lihat Ara Hidayat & Imam Machali, *Pengelolaan..... Ibid*, hlm. 264.

penyedia fasilitas, pengatur kegiatan, pengayom kegiatan, penyedia dana, pembina kegiatan, dan pemecah masalah.

3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan sebagai pembangkit dan penyampai aspirasi masyarakat, pemberi motivasi, pendamping masyarakat, fasilitator, pengembang, penyedia dana, penyedia teknologi, penyedia informasi pasar, dan penyedia tenaga ahli, dan pengelola program.

Dalam manajemen berbasis masyarakat, masyarakat berperan sangat penting. Partisipasi masyarakat perlu diupayakan dalam penyelenggaraan PAUD seharusnya tidak sekedar dalam bentuk pendidikan anak usia dini oleh yayasan atau badan sosial. Peran masyarakat pada umumnya dan orangtua murid pada khususnya perlu digalakan juga. Morrison dalam Soemiarti mengemukakan tiga kemungkinan keterlibatan orang tua, yaitu: orientasi pada tugas, orientasi pada proses dan orientasi ada perkembangan.²⁵

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Ibrahim Bafadal, bahwa ada dua peran serta yang perlu digalakan. *Pertama*, peran serta secara langsung, seperti mendirikan pendidikan anak usia dini yang berkualitas baik., *Kedua*, peran serta secara tidak langsung, seperti aktif dalam kepengurusan maupun keanggotaan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) atau komite sekolah.²⁶

Peran serta secara tidak langsung tersebut bisa juga dengan menciptakan lingkungan rumah tangga dan masyarakat yang berfungsi sebagai lingkungan pendidikan dan selakigus sumber belajar bagi anak. Banyak sekali bentuk dan kegiatan didalam rumah tangga secara tidak disadari berperan aktif terhadap proses

²⁵ Lihat Soemiarti Patmonodewo, *Pendidikan Anak Prasekolah*, Cet. 2, (Jakarta: Kerjasama Depdikbud dan PT Rineka Cipta, 2013), hlm. 125.

²⁶ Ibrahim Bafadal, *Dasar-dasar . . . Ibid*, hlm. 57

perkembangan pendidikan anak. Demikian pula banyak sekali bentuk kegiatan dalam masyarakat yang secara tidak disadari mempengaruhi proses perkembangan daya cipta, kemampuan berbahasa, dan kedisiplinan anak yang ada didalamnya.²⁷

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat sangat penting sehingga membina hubungan yang baik dengan masyarakat harus dikembangkan. Pentingnya hubungan yang baik antar elemen yang saling berkaitan dalam memajukan pendidikan yang lebih baik menurut Ibrahim Bafadal, antara lain:²⁸

1. Dengan adanya hubungan yang baik dapat dengan mudah mengoptimalkan peran serta masyarakat itu sendiri dalam memajukan program pendidikan. Seperti dalam bentuk:
 - a. Masyarakat membantu menyediakan fasilitas-fasilitas pendidikan yang diperlukan PAUD.
 - b. Orangtua memberikan informasi kepada guru di PAUD tentang potensi yang dimiliki anaknya.
 - c. Orangtua memberikan lingkungan rumah tangga yang memberikan pendidikan kepada anaknya.
2. Dengan adanya hubungan yang baik, maka masyarakat khususnya orangtua akan selalu mendapatkan informasi berkaitan dengan pendidikan yang diperoleh anaknya. Dengan informasi tersebut orangtua dapat lebih lanjut memberikan pendidikan yang sesuai bagi anaknya.

Dalam upaya melibatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini diperlukan kemampuan dalam menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan dan masyarakat agar pengelolaan lembaga Pendidikan

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*, hlm.57-58.

Anak Usia Dini (PAUD) dapat berkolaborasi dan memanfaatkan potensi masyarakat sekitar.

Desain Kurikulum Lembaga PAUD Berbasis Masyarakat

Kurikulum adalah seperangkat kegiatan belajar melalui bermain yang dapat memberikan pengalaman langsung bagi anak dalam rangka mengembangkan seluruh potensi perkembangan yang dimiliki oleh setiap anak.²⁹ Titik tekan dari kurikulum pendidikan anak usia dini yang membedakan dengan kurikulum pada jenjang yang lainnya adalah, bahwa perangkat kegiatan belajarnya melalui bermain. Anak usia dini tidak bisa dilepaskan dari dunia bermain, sehingga diperlukan sistem pengajaran bagi anak usia dini yang menyenangkan.

Secara umum kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dapat dimaknai sebagai seperangkat kegiatan belajar sambil bermain yang sengaja direncanakan untuk dapat dilaksanakan dalam rangka menyiapkan dan meletakkan dasar-dasar bagi pengembangan diri anak usia dini lebih lanjut. Albercht dan Miller sebagaimana dikutip oleh Yuliani berpendapat bahwa dalam pengembangan program kegiatan bermain (kurikulum) bagi anak usia dini seharusnya sarat dengan aktivitas bermain yang mengutamakan adanya kebebasan bagi anak untuk bereksplorasi dan berkreaitivitas, sedangkan orang dewasa seharusnya lebih berperan sebagai fasilitator pada saat anak membutuhkan bantuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.³⁰

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan program pendidikan bagi anak usia dini sebagaimana diungkapkan oleh Jamal Ma'ruf, diantaranya adalah:

²⁹ Yuliani Nurani Sujiono, *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, Cet. V, (Jakarta: Indeks, 2012), hal. 198.

³⁰*Ibid.*

1. Kurikulum pada pendidikan anak usia dini didesain berdasarkan tingkat perkembangan anak.
2. Materi maupun metodologi pendidikan yang dipakai dalam rangka pendidikan anak usia dini harus benar-benar memperhatikan tingkat perkembangan mereka. Dimana setiap periode perkembangan mengemban tugas perkembangan tertentu.
3. Kompetensi akademis merupakan alat untuk mencapai tujuan, dan manipulasi dilihat sebagai materi yang berguna untuk pengembangan diri anak. Montessori menganjurkan perlu adanya area berbeda yang mewakili lingkungan yang disediakan, yaitu:
 - a. *Practical life* memberikan pengembangan dari tugas organisasional dan urutan kognisi melalui perawatan diri sendiri, perawatan lingkungan, melatih rasa syukur dan saling menghormati, serta koordinasi dari pergerakan fisik
 - b. *The sensorial area* membuat anak mampu untuk mengurut, mengklasifikasi dan menerangkan impresi sensori dalam hubungannya dengan panjang, lebar, temperatur, masa, warna, titik, dan lain-lain.
 - c. *Mathematics* memanfaatkan pemanipulasian materi agar anak mampu untuk menginternalisasikan konsep angka, simbol, urutan operasi, dan memorisasi dari fakta dasar.
 - d. *Language art* yang didalamnya termasuk pengembangan bahasa lisan, tulisan, membaca, kajian tentang *grammar*, dramatisasi, dan kesastraan anak-anak.
 - e. *Cultural activities* membawa anak-anak untuk mengetahui dasar-dasar geografis, sejarah, dan ilmu sosial. Musik dan seni lainnya merupakan bagian dari kurikulum terintegrasi.

4. Lingkungan pendidikan anak usia dini menggabungkan fungsi psiko-sosial, fisik, dan akademis dari seorang anak. Dasar ini akan membuat anak-anak mampu untuk mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang lebih spesifik dalam kehidupan sekolah mereka.³¹

Nana Syaodih Sukmadinata mengungkapkan bahwa kurikulum dapat diumpamakan sebagai suatu organisme manusia ataupun binatang, yang memiliki susunan anatomi tertentu. Unsur atau komponen-komponen dari anatomi tubuh dalam kurikulum yang utama adalah tujuan, isi atau materi, proses atau sistem penyampaian dan media, serta evaluasi. Dimana keempat komponen tersebut saling berkaitan erat satu sama lain. Ia juga menambahkan bahwa suatu kurikulum harus memiliki kesesuaian dan relevansi yang meliputi dua hal: *Pertama* kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat. *Kedua* kesesuaian antar komponen-komponen kurikulum, yaitu isi sesuai dengan tujuan, proses sesuai dengan isi dan tujuan, demikian juga evaluasi harus sesuai dengan proses, isi, dan tujuan kurikulum.³²

Dibawah ini beberapa analisis keempat komponen kurikulum berdasarkan kurikulum lembaga PAUD berbasis masyarakat:

1. Tujuan

Secara umum tujuan pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selain itu berkaitan dengan tujuan

³¹Jamal Ma'ruf Asmani, *Manajemen Strategi PAUD*, (Yogyakarta: Diva Press, 2009), hal. 151-154

³²Nana Syaodih Sukmadinata. *Pengembangan Kurikulum; Teori dan Praktek*, Cet. XII, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 102.

penyelenggaraan PAUD adalah mengarah pada tugas-tugas perkembangan di setiap rentangan usia anak.

Peran masyarakat dalam menentukan tujuan terselenggaranya lembaga PAUD menjadi sangat vital, karena masyarakatlah yang lebih mengetahui apa saja hal-hal yang dibutuhkan dan perlu dikembangkan dalam diri anak. Dengan demikian maka kebutuhan masyarakat akan terakomodir dengan baik.

2. Isi atau Materi

Anak belajar dalam bentuk interaksi dengan lingkungannya, lingkungan orang-orang, alat-alat dan ide. Tugas guru dalam hal ini adalah menciptakan lingkungan tersebut untuk mendorong siswa untuk melakukan interaksi yang produktif dan memberikan pengalaman belajar yang dibutuhkan. Kegiatan dan lingkungan demikian dirancang dalam suatu rencana mengajar yang mencakup seluruh komponen kurikulum yang ada.

Landasan keilmuan yang mendasari pentingnya pendidikan anak usia dini didasarkan kepada beberapa penemuan para ahli tentang tumbuh kembang anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan perkembangan struktur otak. Menurut Wittrock, ada tiga wilayah perkembangan otak yang semakin meningkat, yaitu pertumbuhan serabut dendrit, kompleksitas hubungan sinapsis, dan pembagian sel saraf. Peran ketiga wilayah otak tersebut sangat penting untuk pengembangan kapasitas berpikir manusia. Sejalan dengan itu Teyler mengemukakan bahwa pada saat lahir otak manusia berisi sekitar 100 milyar hingga 200 milyar sel saraf. Tiap sel saraf siap berkembang sampai taraf tertinggi dari kapasitas manusia jika mendapat stimulasi yang sesuai dari lingkungan.

Jean Piaget (1972) mengemukakan tentang bagaimana anak belajar: "Anak belajar melalui interaksi dengan lingkungannya.

Anak seharusnya mampu melakukan percobaan dan penelitian sendiri. Guru bisa menuntun anak-anak dengan menyediakan bahan-bahan yang tepat, tetapi yang terpenting agar anak dapat memahami sesuatu, ia harus membangun pengertian itu sendiri, dan ia harus menemukannya sendiri.” Sementara Lev Vigostsky meyakini bahwa : pengalaman interaksi sosial merupakan hal yang penting bagi perkembangan proses berpikir anak. Aktivitas mental yang tinggi pada anak dapat terbentuk melalui interaksi dengan orang lain. Pembelajaran akan menjadi pengalaman yang bermakna bagi anak jika ia dapat melakukan sesuatu atas lingkungannya. Howard Gardner menyatakan tentang kecerdasan jamak dalam perkembangan manusia terbagi menjadi: kecerdasan bodily kinestetik, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan naturalistik, kecerdasan logiko – matematik, kecerdasan visual – spasial, kecerdasan musik.

Selain itu bahwa materi yang diberikan harus mengacu dan sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan yang sesuai dengan perkembangan anak dan kebutuhan masyarakat. Misalkan adalah bagaimana lembaga PAUD mampu mengenalkan jenis-jenis makanan atau permainan lokalnya masing-masing sehingga. Sehingga perlu dibuat matriks standar tingkat pencapaian perkembangan anak.

3. Proses

Proses disini berisi metode, strategi, serta media yang digunakan dalam pengajaran. Penyusunan sekuens bahan ajar berhubungan erat dengan strategi atau metode mengajar. Pada waktu guru menyusun sekuens suatau bahan ajar, ia juga harus memikirkan metode dan strategi mengajar mana yang sesuai untuk menyajikan bahan ajar dengan urutan seperti itu.

Diantara sebab ketertinggalannya negara Indonesia dengan Negara lain adalah karena lemahnya masyarakat Indonesia melakukan research. Masih sedikit sekali masyarakat

Indonesia yang mampu menemukan sesuatu yang baru. Sehingga perlunya metode pengajaran dalam PAUD yang mengajarkan anak untuk mampu mencari dan menemukan sesuatu, sehingga pada kemudian hari akan lahir generasi masyarakat Indonesia yang lebih unggul. .

Sedangkan media pembelajaran bagi anak usia dini yang perlu diperhatikan adalah bahwa pendidik harus mampu memberikan rasa bangga dengan mengenalkan Alat Peraga Edukatif (APE) yang berbasis lokal. Mengingat banyak masyarakat Indonesia yang melupakan nilai-nilai luhur bangsa dan seakan tercerabut dari akar keindonesiannya.

4. Evaluasi

Evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. Tiap kegiatan kan memberikan umpan balik, demikian juga dalam pencapaian tujuan-tujuan belajar dan proses pelaksanaan mengajar. Umpan balik tersebut digunakan untuk mengadakan berbagai usaha penyempurnaan baik bagi penentuan perumusan tujuan mengajar, penentuan sekuens bahan ajar, strategi, dan media mengajar.

Dalam PAUD, evaluasi yang terbaik dan dianjurkan untuk dilakukan adalah rangkaian sebuah *assessment* melalui observasi partisipatif terhadap segala sesuatu yang dilihat, didengar dan diperbuat oleh anak. Guru PAUD harus mampu merekam secara gamblang pada setiap tahap perkembangan masing-masing individu anak tanpa terlewat sedikitpun.

Evaluasi PAUD disini juga nanti akan berkaitan dengan sejauh mana pencapaian tahapan perkembangan anak yang dibuat dalam matriks materi PAUD. Pelaporan harus dilakukan secara berkala dan konsisten. Masyarakat memiliki hak dalam mengetahui laporan *assessment* tersebut, mengingat segala

tujuan pendidikan dalam lembaga PAUD disusun oleh masyarakat.

Simpulan

Pendidikan berbasis masyarakat pada dasarnya adalah pendidikan yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya maupun pengelolaannya. Mengingat pentingnya pendidikan anak usia dini yang merupakan masa golden age, maka sudah selayaknya para elemen-elemen yang mencakup keluarga, sekolah, dan masyarakat turut berpartisipasi dan membina hubungan yang baik dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas khususnya bagi pendidikan anak usia dini (PAUD).

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini harus ditingkatkan. Ada dua peran serta yang perlu digalakan. Pertama, peran serta secara langsung, seperti mendirikan pendidikan anak usia dini yang berkualitas baik dan ikut dalam mengelola., Kedua, peran serta secara tidak langsung, seperti aktif dalam kepengurusan maupun keanggotaan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) atau komite sekolah dan sebagai donatur.

Paling tidak, ada 8 jenis masyarakat yang berperan dalam manajemen berbasis masyarakat dalam pengelolaan PAUD antara lain: perseorangan (tokoh agama), keluarga, Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) atau komite sekolah, organisasi profesi (GOPTKI, IGTKI, IGPAUD), pengusaha, organisasi kemasyarakatan, pengendalian mutu layanan pendidikan, lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Saran

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan di negeri ini memiliki niatan baik melibatkan masyarakat yang perlu kita apresiasi bersama, yaitu dengan ditetapkannya peran serta

masyarakat secara yuridis dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003. Namun patut kita sayangkan, ketika pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana tertuang dalam undang-undang tersebut masih harus mengacu pada standar nasional pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Walhasil kebijakan tersebut ternyata masih setengah hati, karena kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pendidikan masih harus mendapat intervensi penuh dari pemerintah.

Tidak banyak yang bisa kita temukan lembaga-lembaga pendidikan yang memang benar-benar menerapkan manajemen berbasis masyarakat. Hanya beberapa lembaga pendidikan yang konsisten dengan hal tersebut, seperti contoh sitem yang digunakan pada: sekolah alternatif Qoriyah Toyyibah di Salatiga, sekolah alam di Klaten, sekolah anak petani di Gunungkidul, lembaga pendidikan di pesantren, dan lain sebagainya.

Hasilnya adalah lembaga-lembaga tersebut saat ini seakan terdiskriminasi karena tidak mengacu atau mengikuti aturan sistem pendidikan nasional atau dalam istilah *state based education*. Jika pengelolaan lembaga PAUD yang ada diatur dengan meliatkan secara penuh peran masyarakat, maka kedepan sistem pendidikan di Indonesia akan melahirkan generasi berkualitas yang mampu menjawab sekian banyak tantangan zaman.

Daftar Pustaka

- Amtu, Onisius. (2013). *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi,, & Lia Yuliana. (2008). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Asmani, Jamal Ma'ruf. (2009). *Manajemen Strategi PAUD*. Yogyakarta: Diva Press.
- Bafadal, Ibrahim. (2004). *Dasar-dasar Manajemen dan Supervisi Taman Kanak-kanak*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Hidayat, Ara., & Imam Machali. (2012). *Pengelolaan Pendidikan*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Iskandar. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Jalal, Fasli., & Dedi Supriadi. (2001). *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Kartini Kartono. (1997). *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional: Beberapa Kritik dan Sugesti.*, Cet. I., Jakarta: Pradnya Paramita.
- Nata, Abbudin. (2003). *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Bandung: Angkasa.
- Sagala, Syaiful. (2010). *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Soetomo. (2012). *Keswadayaan Masyarakat: Manifestasi Masyarakat untuk Berkembang secara Mandiri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Toto. (2012). *Pendidikan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: LKIS.
- Sujiono, Yuliani Nurani. (2012). *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini.*, Cet. V., Jakarta: Indeks.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2010). *Pengembangan Kurikulum; Teori dan Praktek*. Cet., XII. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, H.A.R. (2003). *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural.*, Cet. I. Magelang: Indonesiatara.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. (2011). Cet. IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zubaedi. (2005). *Pendidikan Berbasis Masyarakat, Upaya Menawarkan Solusi Terhadap Berbagai Problem Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

